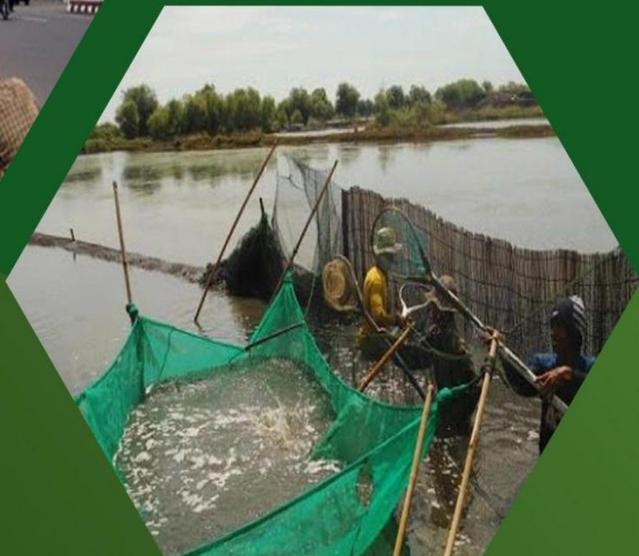


PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KENDAL MENURUT PENGELUARAN

2013-2017



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KENDAL MENURUT PENGELUARAN

2013-2017



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN KENDAL
MENURUT PENGELUARAN 2013-2017**

ISBN : 978-602-71234-4-1
Nomor Publikasi : 34550.1705
Katalog BPS : 9302020.3324
Ukuran Buku : 21,5 cm x 29,7 cm
Jumlah halaman : vii + 74 halaman

Naskah:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:
Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Regional

Diterbitkan Oleh:
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal

Dicetak Oleh:
CV. Mitra Jaya Mandiri

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN KENDAL
MENURUT PENGELUARAN 2013-2017**

Anggota Tim Penyusun:

Penanggung Jawab : Dra. Ummi Hastuti, M.Si.

Penyunting : Irma Nur Afifah, SST, M.Si

Penulis : Indriyati, SST, M.Si

Pengolah Data : Indriyati, SST, M.Si

Gambar Kulit : Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Regional, BPS-RI.

<https://kendalkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Di samping itu data ini juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan model ekonomi dalam rangka menyusun rencana kebijakan kedepan.

Dalam publikasi ini ditampilkan PDRB yang dihitung dengan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*). Melalui pendekatan ini, PDRB dirinci menurut komponen pengeluaran yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori, dan Ekspor Impor. Buku PDRB Kabupaten Kendal menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 ini merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh BPS Kabupaten Kendal. Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kami ucapkan terimakasih kepada tim penyusun yang telah mewujudkan publikasi PDRB menurut pengeluaran ini. Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Kendal, Agustus 2018

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Kabupaten Kendal,



m **Dra. Ummi Hastuti, M.Si**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	2
b. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
c. Kegunaan Statistik PDRB.....	5
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	7
A. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT)	8
B. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PKLNPRT)	11
C. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP)	13
D. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	16
E. Perubahan Inventori	20
F. Ekspor Impor Barang dan Jasa	23
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KENDAL BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2013-2017	26
A. Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Kendal menurut Pengeluaran	27
B. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	33
C. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	37
D. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	38
E. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	40
F. Perkembangan Perubahan Inventori	42
G. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa	43
H. Perkembangan Impor Barang dan Jasa	44
I. Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	46

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2013-2017	49
	A. PDRB (Nominal)	50
	B. Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor	51
	C. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB	52
	D. Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	53
	E. Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	54
	F. Perbandingan PDRB terhadap Impor	55
	H. Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	56
	J. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	57
BAB V	PENUTUP	59
	DAFTAR PUSTAKA	62
	LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	PDRB Adh Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 (<i>Miliar Rp</i>)	27
Tabel 2.	PDRB Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 (<i>Miliar Rp</i>)	28
Tabel 3.	Distribusi PDRB Adh Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 (<i>Persen</i>)	30
Tabel 4.	Pertumbuhan PDRB Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017(<i>Persen</i>)	32
Tabel 5.	Indeks Implisit PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 (<i>Persen</i>)	32
Tabel 6.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2013-2017	34
Tabel 7.	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2013-2017 (<i>Persen</i>)	35
Tabel 8.	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2013-2017 (<i>Persen</i>).....	36
Tabel 9.	Pertumbuhan Indeks Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2013-2017 (<i>Persen</i>)	37
Tabel 10.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Tahun 2013-2017	38
Tabel 11.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2013-2017	39
Tabel 12.	Perkembangan dan Struktur PMTB Tahun 2013-2017	41
Tabel 13.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Tahun 2013-2017	42
Tabel 14.	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Wilayah Tahun 2013-2017	44
Tabel 15.	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Wilayah Tahun 2013-2017	45
Tabel 16.	Perkembangan Ekspor dan Impor Antar Daerah Tahun 2013-2017	48

Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita Tahun 2013-2017	50
Tabel 18. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2013-2017	52
Tabel 19. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2013-2017	53
Tabel 20. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Tahun 2013-2017	53
Tabel 21. Rasio Ekspor terhadap PMTB Tahun 2013-2017	54
Tabel 22. Rasio PDRB terhadap Impor Tahun 2013-2017	55
Tabel 23. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Tahun 2013-2017	56
Tabel 24. Incremental Capital Output Ratio Tahun 2013-2017	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan PDRB Adh Berlaku dan Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017.....	29
Grafik 2. Perbandingan Distribusi PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2013 dan Tahun 2017	31
Grafik 3. Pertumbuhan Beberapa Komponen Pengeluaran 2013-2017 (<i>Persen</i>)	42
Grafik 4. Pertumbuhan Ekspor dan Impor Luar Negeri Tahun 2013-2017	46

<https://kendalkab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (<i>Juta Rupiah</i>).....	64
Lampiran 2.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran (<i>Juta Rupiah</i>)	65
Lampiran 3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (<i>Persen</i>) ...	66
Lampiran 4.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (<i>Persen</i>)	67
Lampiran 5.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (<i>Persen</i>)	68
Lampiran 6.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (<i>Persen</i>) ..	69
Lampiran 7.	Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto menurut Pengeluaran (<i>Persen</i>)	70
Lampiran 8.	Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (Tahun 2010=100) menurut Pengeluaran (<i>Persen</i>)	71
Lampiran 9.	Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto (Tahun 2010=100) menurut Pengeluaran (<i>Persen</i>)	72
Lampiran 10.	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (Tahun 2010=100) (<i>Persen</i>)	73
Lampiran 11.	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (Tahun 2010=100) (<i>Persen</i>)	74

BAB I

PENDAHULUAN



a. Latar Belakang

Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran. Penghitungan PDRB dengan pendekatan produksi diperoleh dari selisih nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas ekonomi, dikurangi dengan bahan baku yang digunakan sebagai input, ditambah pajak atas produk, serta dikurangi subsidi atas produk. PDRB dengan pendekatan produksi ini lebih dikenal dengan istilah PDRB menurut lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha merupakan gambaran kondisi sisi penawaran (*supply side*) dari suatu ekonomi yang dibedakan menurut beberapa kategori lapangan usaha. Berbeda dengan PDRB sebelumnya, penghitungan PDRB dengan metode baru (SNA 2008), juga telah “merubah” cakupan dan beberapa istilah yang digunakan. Misalnya saja, istilah sektor sekarang diganti menjadi kategori, cakupan yang sebelumnya hanya 9 sektor, sekarang berubah menjadi 17 kategori lapangan usaha.

Sejalan dengan pendekatan produksi, gambaran perekonomian dari sisi permintaan (*demand side*) sudah seharusnya juga tersedia. Gambaran struktur ekonomi dari sisi permintan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penghitungan PDRB menurut pendekatan pengeluaran. Melalui pendekatan pengeluaran, PDRB diperoleh dari penjumlahan seluruh pengeluaran barang dan jasa untuk konsumsi rumahtangga, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumahtangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, dan ekspor dikurangi impor barang dan jasa. Selain untuk melihat pertumbuhan ekonomi, PDRB menurut penggunaan juga memperlihatkan komposisi penggunaan/permintaan barang dan jasa, baik yang dihasilkan di dalam atau dari luar wilayah dalam periode tahun tertentu untuk memenuhi permintaan.

Menyadari bahwa penghitungan PDRB dengan menggunakan kedua pendekatan sama pentingnya, maka BPS Kabupaten Kendal melakukan studi penghitungan PDRB menurut pengeluaran. Dengan berbekal hasil studi tersebut, maka mulai tahun 2015, BPS Kabupaten Kendal mulai melakukan penghitungan PDRB menurut pengeluaran secara rutin. Penghitungan ini dilakukan dengan menggunakan tahun dasar baru (seri 2010), sesuai dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

b. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto atau balas jasa faktor produksi yang dihasilkan di suatu wilayah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Penyusunan PDB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal merupakan angka yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan. Secara konseptual, PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur perekonomian di suatu wilayah. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan atau dikenal dengan PDRB riil menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu. PDRB atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari suatu periode ke periode tertentu.

Terdapat tiga pendekatan yang bisa digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

1. Pendekatan Produksi

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan ke dalam beberapa sektor lapangan usaha. Mulai tahun 2015, sebagaimana rekomendasi SNA 2008, pengelompokan sektor lapangan usaha diperluas menjadi 17 kategori lapangan usaha yang dirinci menjadi sub-sub kategori lapangan usaha, yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,
2. Pertambangan dan Penggalian,
3. Industri Pengolahan,
4. Pengadaan Listrik dan Gas,
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,
6. Konstruksi,
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,

8. Transportasi dan Pergudangan,
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,
10. Informasi dan Komunikasi,
11. Jasa Keuangan dan Asuransi,
12. Real Estat,
13. Jasa Perusahaan,
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib,
15. Jasa Pendidikan,
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial,
17. Jasa lainnya.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB menurut penggunaan disebut juga sebagai PDRB menurut permintaan atau PDRB menurut pengeluaran. Penghitungan PDRB menurut penggunaan menggambarkan bagaimana penggunaan barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai golongan dalam masyarakat. Barang dan jasa yang dimaksud merupakan seluruh barang jadi dan jasa yang diproduksi di suatu daerah/wilayah selama periode waktu tertentu, yang digunakan untuk konsumsi akhir. Yang dimaksud dengan barang jadi adalah barang yang tidak digunakan untuk diproses kembali oleh suatu industri, tetapi untuk dikonsumsi oleh penduduk. Barang setengah jadi (*intermediate goods*) tidak termasuk dalam penghitungan PDRB menurut penggunaan, karena barang setengah jadi digunakan untuk diproses kembali menjadi barang jadi. Oleh karena itu, nilai barang setengah jadi tersebut sudah termasuk di dalam barang jadi yang dihasilkan.

Dari sisi pengeluaran, besaran PDRB tersusun dari tiga komponen utama, pertama adalah besaran konsumsi, baik konsumsi rumah tangga, pemerintah, maupun lembaga swasta nirlaba; kedua adalah pembentukan modal tetap bruto, dan ketiga adalah net ekspor, yaitu besarnya ekspor dikurangi dengan impornya. Secara lebih detail, PDRB dari sisi pengeluaran, terdiri dari komponen;

1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor Neto (ekspor minus impor)
6. Perubahan Stok

Secara teoritis, total PDRB yang dihitung melalui ke tiga pendekatan di atas akan menghasilkan nilai yang sama besar. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tidak langsung neto. Penghitungan PDRB melalui pendekatan produksi dan atau pendekatan pendapatan akan disajikan dalam bentuk data *PDRB menurut Lapangan Usaha*, sedangkan melalui pendekatan pengeluaran disajikan dalam bentuk data *PDRB menurut Penggunaan*. Sebagaimana judulnya, publikasi ini membahas PDRB pengeluaran dengan menggunakan tahun dasar baru (2010) agar dapat mencerminkan struktur ekonomi terkini secara lebih baik.

c. Kegunaan Statistik PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah/*region*. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, atau setiap sektor, dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah/daerah/*region*. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/daerah/*region*.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran dapat menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/luar wilayah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan institusi dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
7. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II
METODE ESTIMASI
DAN SUMBER DATA



A. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PKRT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh institusi lain.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 (dua belas) COICOP tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok

2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
- Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun dari BPS,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).
- Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas, menghasilkan besarnya PKRT adh Berlaku. PKRT adh Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT adh Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok COICOP,
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;

5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;;
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

B. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT (PKLNPRT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud di sini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga,

yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPRT) sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan; pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKLNPRT adalah :

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP).
- Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
- Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

PKLNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP). Tahapan estimasi PKLNPRT adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata

pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PKLNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- b. Mengestimasi PKLNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PKLNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRT adh Berlaku. PKLNPRT adh Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-deflate PKLNPRT adh Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

C. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PKP)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai

pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
- b. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten mencakup PK-Pemerintah Provinsi yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten; PK-Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan; PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten; dan PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Kabupaten bersangkutan.

2. Metode Penghitungan

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kabupaten Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

a. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar-penjualan barang dan jasa} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Kabupaten, PK-P Kabupaten adh Berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Kabupaten itu sendiri + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari kabupaten yang bersangkutan.

b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar

(IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

D. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun

- barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
 - c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi; reklamasi pantai; pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan; serta pencegahan banjir dan erosi).

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PMTB adalah :

- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga (level provinsi).
- Laporan keuangan perusahaan.
- Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- Publikasi Statistik Konstruksi.
- Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi

barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “*reflate*”(dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). **Kedua**, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-“*deflate*” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data yang dikumpulkan antara lain nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

E. PERUBAHAN INVENTORI

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Tetap Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau

bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait, dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);

- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian.

Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori *adh Berlaku*, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- menghitung posisi inventori *adh Konstan*, dengan cara *men-deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori *adh Konstan* dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori *adh Berlaku* dengan *meng-inflate* perubahan inventori *adh Konstan* dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan, bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. *men-deflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

F. EKSPOR IMPOR BARANG DAN JASA

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi/kab/kota tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi/kab/kota tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi ekspor impor adalah :

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- Neraca Pembayaran Indonesia dari Bank Indonesia
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu, nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian

langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (*residu*) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<https://kendalkab.bps.go.id>

<https://kendalkab.bps.go.id>

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Kendal akibat proses pembangunan ekonomi tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Kendal digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

A. TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN KENDAL MENURUT PENGELUARAN

**Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran
Tahun 2013-2017 (Miliar Rp)**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	15,538.15	17,190.08	18,722.68	20,191.14	21,930.16
2. Konsumsi LNPRT	236.60	276.18	295.23	314.27	342.27
3. Konsumsi Pemerintah	1,434.72	1,584.32	1,796.34	1,899.21	1,987.32
4. PMTB	6,864.53	7,751.98	8,606.66	9,402.27	10,305.02
5. Perubahan Inventori	1,623.11	793.19	383.25	345.52	479.94
6. Ekspor	13,567.18	14,383.51	15,696.78	17,665.49	19,155.54
7. Impor	13,989.75	13,784.91	14,549.29	16,022.36	17,758.36
PDRB PENGELUARAN	25,274.54	28,194.36	30,951.64	33,795.54	36,441.88

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran
Tahun 2013-2017 (Miliar Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	13,296.71	13,914.92	14,480.65	15,115.43	15,805.20
2. Konsumsi LNPRT	195.22	212.77	212.57	219.82	230.79
3. Konsumsi Pemerintah	1,150.06	1,178.81	1,217.52	1,228.47	1,252.47
4. PMTB	6,096.41	6,249.63	6,539.81	6,915.76	7,386.03
5. Perubahan Inventori	794.15	650.37	167.19	190.39	211.65
6. Ekspor	12,446.69	12,978.02	13,812.81	14,590.05	15,528.74
7. Impor	11,593.11	11,647.69	11,668.23	12,128.79	12,828.79
PDRB PENGELUARAN	22,386.12	23,536.83	24,762.33	26,131.14	27,586.10

Catatan:

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

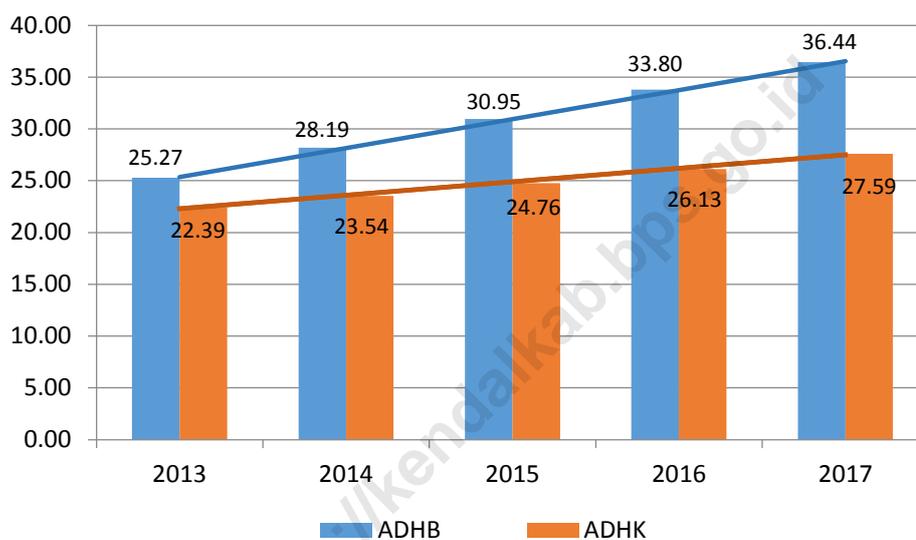
Kondisi perekonomian Kabupaten Kendal menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan ekonomi yang tetap menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) dan atas dasar harga konstan (adhk), serta pertumbuhan pada total PDRB.

Nilai PDRB Kabupaten Kendal atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2013 sampai dengan 2017 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, begitu pula dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume pada setiap komponen.

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010. Penghitungan nilai PDRB ADHK 2010 menggunakan dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya

berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2013–2017, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Kendal berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel 2. Sama halnya dengan PDRB ADHB, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Grafik 1. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 (Trilyun Rupiah)



Dari grafik 1, nampak bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku lebih besar dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku. Dalam PDRB ADHK pengaruh harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

**Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran
Tahun 2013—2017 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	61.48	60.97	60.49	59.74	60.18
2. Konsumsi LNPR	0.94	0.98	0.95	0.93	0.94
3. Konsumsi Pemerintah	5.68	5.62	5.80	5.62	5.45
4. PMTB	27.16	27.49	27.81	27.82	28.28
5. Perubahan Inventori	6.42	2.81	1.24	1.02	1.32
6. Ekspor	53.68	51.02	50.71	52.27	52.56
7. Impor	55.35	48.89	47.01	47.41	48.73
PDRB PENGELUARAN	100	100	100	100	100

Catatan:

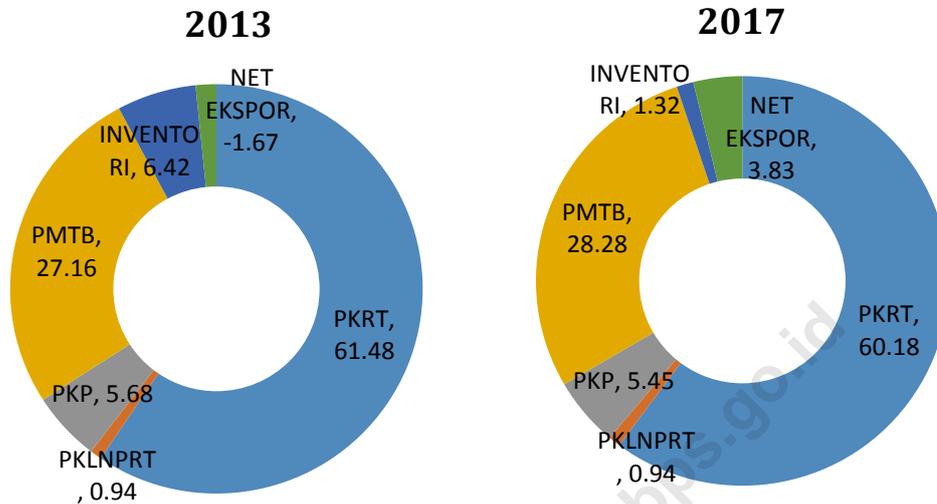
* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2013 - 2017, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 60 persen).

Ekspor dan Impor juga mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 50-54 persen produk Kabupaten Kendal diperdagangkan ke luar daerah, baik ke luar kabupaten/kota maupun ke provinsi lain di Indonesia. Demikian halnya dengan impor mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 47 - 55 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor (dari luar wilayah Kabupaten Kendal). Pengeluaran untuk modal (PMTB) memberi kontribusi sekitar 27 - 28 persen, sedangkan kontribusi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 5 - 6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Pada tahun 2013-2017 perdagangan Kabupaten Kendal yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor pada tahun 2013 menunjukkan posisi "defisit", sedangkan dalam kurun waktu 2014-2017 menunjukkan posisi "surplus".

Grafik 2. Perbandingan Distribusi PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2013 dan Tahun 2017 (Persen)



Dari Gambar 2 terlihat bahwa struktur PDRB Pengeluaran menurut komponen menunjukkan pola yang hampir sama. PDRB masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran PMTB yang mencapai hampir 90 persen. Perubahan hanya terjadi pada distribusi persentase nilai net ekspor yang semakin membaik, namun sebaliknya persentase perubahan inventori yang semakin kecil.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal dari tahun 2013 - 2017 secara rata-rata mencapai 5,53 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 6,22 persen (2013); 5,14 persen (2014); 5,21 persen (2015); 5,53 persen (2016); dan 5,57 persen (2017). Secara umum pertumbuhan ekonomi kabupaten Kendal cukup baik dalam kurun waktu lima tahun ini, walaupun sempat mengalami perlambatan pada tahun 2014 namun kembali mengalami percepatan hingga tahun 2017 ini.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Pengeluaran Tahun 2013—2017 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.63	4.65	4.07	4.38	4.56
2. Konsumsi LNPRRT	8.72	8.98	(0.09)	3.41	4.99
3. Konsumsi Pemerintah	5.87	2.50	3.28	0.90	1.95
4. PMTB	8.32	2.51	4.64	5.75	6.80
5. Perubahan Inventori	(33.08)	(18.10)	(74.29)	13.88	11.17
6. Ekspor	1.74	4.27	6.43	5.63	6.43
7. Impor	(2.96)	0.47	0.18	3.95	5.77
PDRB PENGELUARAN	6.22	5.14	5.21	5.53	5.57

Catatan:

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB menurut Pengeluaran
Tahun 2013- 2017 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	116.86	123.54	129.29	133.58	138.75
2. Konsumsi LNPRRT	121.19	129.81	138.89	142.97	148.30
3. Konsumsi Pemerintah	124.75	134.40	147.54	154.60	158.67
4. PMTB	112.60	124.04	131.60	135.95	139.52
5. Perubahan Inventori	204.38	121.96	229.22	181.48	226.76
6. Ekspor	109.00	110.83	113.64	121.08	123.36
7. Impor	120.67	118.35	124.69	132.10	138.43
PDRB PENGELUARAN	112.90	119.79	124.99	129.33	132.10

Catatan:

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan. Indeks implisit pada tahun 2013 sebesar 112,90 persen meningkat menjadi 132,10 persen pada tahun 2017.

B. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data pada Tabel 6 menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Dalam kurun waktu 2013 – 2017 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2013 s.d 2017 relatif stabil di angka 60 – 61 persen. Walaupun pada kurun waktu 2013 – 2016 terus mengalami penurunan, namun telah mengalami peningkatan di tahun 2017. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 61,48 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 59,74 persen.

Angka proporsi pengeluaran konsumsi rumah juga memberikan gambaran bahwa daya beli masyarakat kabupaten Kendal mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik maupun yang berasal dari impor turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per kapita terus meningkat dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Pada tahun 2013 konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 16,77 juta rupiah, yang artinya setiap penduduk

¹ *Indeks perkembangan harga*

Kabupaten Kendal rata-rata mengeluarkan biaya sebesar 16,77 juta rupiah selama setahun untuk konsumsi, baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain). Pengeluaran tersebut terus meningkat setiap tahun dan tahun 2017 rata-rata konsumsi per kapita mencapai 22,9 juta.

**Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Tahun 2013—2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	15,538.15	17,190.08	18,722.68	20,191.14	21,930.16
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	13,296.71	13,914.92	14,480.65	15,115.43	15,805.20
Distribusi Persentase PDRB ADHB (Persen)	61.48	60.97	60.49	59.74	60.18
Penduduk (jiwa)	926,791	934,627	942,283	949,682	957,024
Rata-rata Konsumsi Perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
ADHB per Tahun	16,766	18,392	19,869	21,261	22,915
ADHB per Bulan	1,397	1,533	1,656	1,772	1,910
ADHK per Tahun	14,347	14,888	15,368	15,916	16,515
ADHK per Bulan	1,196	1,241	1,281	1,326	1,376
Pertumbuhan¹⁾ (% ADHK)					
Total konsumsi RT	4.63	4.65	4.07	4.38	4.56
Perkapita	3.73	3.77	3.22	3.57	3.76

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Apabila dilihat menurut harga konstan, pertumbuhan konsumsi per kapita berada pada kisaran 3,22-3,77 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 3,77 persen dan terendah sebesar 3,221 persen pada tahun 2015. Pertumbuhan konsumsi per kapita setiap tahun baik menurut harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk Kabupaten

Kendal meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas).

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan sebesar 4,46 persen pada tahun 2013. Setelah sempat mengalami percepatan di tahun 2014, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan di tahun 2015 hingga mencapai 4,07 kemudian mengalami percepatan kembali hingga di tahun 2017 mencapai 4,56 persen. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 1 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Tabel 7 di bawah, memperlihatkan struktur penggunaan konsumsi akhir rumah tangga. Dari tabel tersebut nampak 3 (tiga) konsumsi yang peranannya paling besar, yaitu konsumsi makanan, minuman dan rokok; konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya; serta konsumsi perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga.

**Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Tahun 2013—2017 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Rumah Tangga					
1.a. Makanan dan Minuman	39.12	38.39	37.93	38.31	37.40
1.b. Pakaian	4.68	4.57	4.53	4.51	4.47
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	13.47	13.75	13.93	14.05	14.31
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6.30	6.37	6.30	6.31	6.33
1.e. Transportasi dan Komunikasi	26.81	27.08	27.25	26.50	26.96
1.f. Restoran dan Hotel	7.77	7.98	8.12	8.32	8.49
1.g. lainnya	1.87	1.86	1.94	1.99	2.03

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari ketiga kelompok konsumsi terbesar tersebut, konsumsi makanan, minuman dan rokok pertumbuhannya cenderung pelan setiap tahun, sangat berbeda dengan pertumbuhan kelompok lain yang cenderung meningkat cukup tinggi di setiap tahunnya. Pada tahun 2017 konsumsi restoran dan hotel mengalami pertumbuhan yang paling tinggi mencapai 6,73 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,66. Sementara konsumsi makanan dan minuman justru mengalami perlambatan menjadi sekitar 3 persen.

Pertumbuhan konsumsi selain makanan dan rokok yang lebih tinggi tersebut menunjukkan kebutuhan *non*-makanan menjadi semakin penting, hal ini sebagai akibat dari pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat yang telah mengalami perubahan/pergeseran. Pertumbuhan konsumsi (riil) ini juga dapat menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menggambarkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

**Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Tahun 2013—2017 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.a. Makanan dan Minuman	1.23	1.55	3.06	3.41	3.01
1.b. Pakaian	5.50	5.76	4.84	4.63	4.86
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	6.86	6.32	5.17	5.09	5.35
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6.51	6.65	3.58	4.10	4.84
1.e. Transportasi dan Komunikasi	6.77	6.56	4.29	4.85	5.27
1.f. Restoran dan Hotel	6.99	6.17	5.35	5.66	6.73
1.g. lainnya	8.56	8.84	5.55	5.17	5.76
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.63	4.65	4.07	4.38	4.56

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tingkat perubahan harga penggunaan konsumsi akhir rumah tangga secara implisit disajikan dalam Tabel 9. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa secara umum rincian peningkatan harga pada kelompok konsumsi akhir rumah tangga mengalami perlambatan dari tahun 2013 hingga 2016, namun kembali mengalami percepatan di tahun 2017.

Tabel 9. Pertumbuhan Indeks Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2013—2017 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.a. Makanan dan Minuman	7.05	6.91	4.42	5.33	2.94
1.b. Pakaian	0.96	2.27	2.89	2.63	2.62
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	4.94	6.25	4.92	3.49	5.00
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1.96	4.87	4.10	3.81	3.93
1.e. Transportasi dan Komunikasi	7.05	4.89	5.08	(0.01)	5.00
1.f. Restoran dan Hotel	5.83	7.05	5.21	4.65	3.86
1.g. lainnya	2.58	1.24	7.31	5.67	4.36
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.86	5.72	4.66	3.31	3.87

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

C. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, yaitu hanya sekitar 1 persen saja. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah masih perlu ditingkatkan lagi. Beberapa lembaga yang memberikan andil cukup besar untuk PKLNPRT adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, dan lembaga keagamaan.

Dari Tabel 10, dapat dilihat pertumbuhan konsumsi LNPRT sempat mengalami penurunan cukup tajam di tahun 2015 hingga berada di angka -0,09 persen. Namun

kemudian mampu meningkat lagi dalam dua tahun terakhir hingga pada tahun 2017 mencapai 4,99 persen.

**Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Tahun 2013—2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	236.60	276.18	295.23	314.27	342.27
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	195.22	212.77	212.57	219.82	230.79
Distribusi Persentase PDRB ADHB (Persen)	0.94	0.98	0.95	0.93	0.94
Laju Pertumbuhan ADHK (Persen)	8.72	8.98	(0.09)	3.41	4.99
Indeks Implisit	121.19	129.81	138.89	142.97	148.30
Laju Implisit	8.83	7.11	7.00	2.94	3.73

Catatan:

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

D. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan konsumsi akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Kendal serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk nilai atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku sebesar 1,435 triliun rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2017 nilainya mencapai 1,987 triliun rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas. Secara riil, konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan pada tahun 2017 mencapai 1,252 triliun rupiah.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Hingga pada tahun 2017 ini mengalami persentase terendah sebesar 5,45 persen sedangkan proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2015 mencapai 5,80 persen.

**Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Tahun 2013 - 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	1,434.72	1,584.32	1,796.34	1,899.21	1,987.32
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	1,150.06	1,178.81	1,217.52	1,228.47	1,252.47
Distribusi Persentase terhadap PDRB ADHB (Persen)	5.68	5.62	5.80	5.62	5.45
Jumlah penduduk (jiwa)	926,791	934,627	942,283	949,682	957,024
Konsumsi Pemerintah per kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	1,548.05	1,695.14	1,906.37	1,999.84	2,076.56
b. ADHK 2010	1,240.91	1,261.26	1,292.10	1,293.56	1,308.71
Laju Pertumbuhan					
a. Total konsumsi pemerintah	5.87	2.50	3.28	0.90	1.95
b. Konsumsi perkapita	4.96	1.64	2.44	0.11	1.17

Catatan:

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2013 konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 1,548 juta rupiah

dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2017 konsumsi pemerintah per kapita sebesar 2,077 juta rupiah.

Konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata per kapita. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Dalam kurun waktu 2013-2017, pertumbuhan konsumsi pemerintah sangat fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013, sebesar 5,87 persen, dan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 0,90 persen. Kondisi yang hampir sama terjadi pada pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 4,96 persen dan terendah tahun 2016 sebesar 0,11 persen.

E. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)². Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect-input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun *riil*. Data pada Tabel 12 menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2013 - 2017 mengalami percepatan walaupun sempat melambat pada tahun 2014 dari 8,32 persen (2013) menjadi 2,51 persen (2014). PMTB dalam bentuk bangunan memberikan proporsi lebih besar dibanding non-bangunan dalam pembentukan modal tetap bruto. Rata-rata perbandingan antara kedua komponen ini adalah sekitar 73 persen untuk PMTB bangunan dan 27 persen untuk non-bangunan.

²Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor
PDRB Kabupaten Kendal Menurut Pengeluaran, 2013-2017

**Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB
Tahun 2013—2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	6,864.53	7,751.98	8,606.66	9,402.27	10,305.02
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	6,096.41	6,249.63	6,539.81	6,915.76	7,386.03
Distribusi Persentase PDRB ADHB (Persen)	27.16	27.49	27.81	27.82	28.28
Struktur PMTB ¹⁾					
a. Bangunan (<i>Miliar Rp</i>) (%)	19.17	19.59	20.38	20.63	21.24
b. NonBangunan (<i>Miliar Rp</i>) (%)	7.99	7.91	7.46	7.19	7.04
Total PMTB (<i>Miliar Rp</i>) (%)	27.16	27.49	27.81	27.82	28.28
Laju Pertumbuhan²⁾ (%)					
a. Bangunan	8.52	3.47	6.70	7.59	8.32
b. Non Bangunan	7.82	0.13	(0.64)	0.66	2.30
c. Total PMTB	8.32	2.51	4.64	5.75	6.80

¹⁾ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

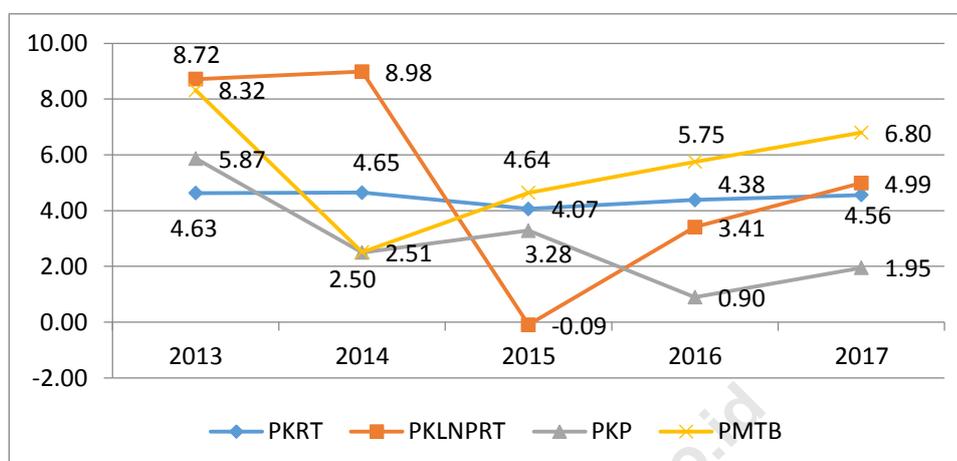
²⁾ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari sisi pertumbuhan atas dasar harga konstan, pertumbuhan PMTB bangunan lebih tinggi setiap tahunnya, dan selama lima tahun ini berada pada kisaran 3,47 - 8,52 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013. Pertumbuhan PMTB non-bangunan sangat fluktuatif, tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 7,82 persen dan terendah pada tahun 2015 yang mengalami kontraksi hingga -0,64 persen.

**Grafik 3. Pertumbuhan Beberapa Komponen Pengeluaran
2013-2017 (Persen)**



F. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Tahun 2013—2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	1,623.11	793.19	383.25	345.52	479.94
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	794.15	650.37	167.19	190.39	211.65
Distribusi Persentase PDRB ADHB (Persen)	6.42	2.81	1.24	1.02	1.32
Laju Pertumbuhan ADHK (Persen)	(33.08)	(18.10)	(74.29)	13.88	11.17

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsi, dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 proporsinya mencapai 6,42 persen, tertinggi dalam kurun waktu 2013-2017, dan terendah sebesar 1,02 persen pada tahun 2016. Proporsi perubahan inventori pada tahun 2017 sebesar 1,32 persen.

G. PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar (negeri), baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya. Dalam konteks ini, termasuk yang dimaksud sebagai ekspor adalah pengiriman barang dari luar wilayah Kabupaten Kendal.

**Tabel 14. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Wilayah
Tahun 2013 - 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	13,567.18	14,383.51	15,696.78	17,665.49	19,155.54
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	12,446.69	12,978.02	13,812.81	14,590.05	15,528.74
Distribusi Persentase PDRB ADHB (Persen)	53.68	51.02	50.71	52.27	52.56
Laju Pertumbuhan ADHK (Persen)	1.74	4.27	6.43	5.63	6.43

Catatan:

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

Total nilai ekspor Kabupaten Kendal atas dasar harga berlaku selama tahun 2017 mencapai 19,156 triliun rupiah naik dari 13,567 triliun rupiah pada tahun 2013. Hal yang tidak jauh berbeda terlihat dari total nilai ekspor atas dasar harga konstan yang juga mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu besar. Secara perlahan, proporsi nilai ekspor terhadap total nilai PDRB Kabupaten Kendal dalam dua tahun terakhir mengalami tren peningkatan. Walaupun sempat mengalami penurunan hingga tahun 2015 dari sebesar 53,68 persen pada tahun 2013, turun menjadi sebesar 50,71 persen pada tahun 2015. Proporsi nilai ekspor terhadap total nilai PDRB Kabupaten Kendal pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 52,56 persen.

H. PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Kendal, sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB pengeluaran dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha.

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari *non residen*. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Kabupaten Kendal terhadap ekonomi atau produk Negara atau wilayah lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Kendal, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

**Tabel 15. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Wilayah
Tahun 2013 - 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	13,989.75	13,784.91	14,549.29	16,022.36	17,758.36
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	11,593.11	11,647.69	11,668.23	12,128.79	12,828.79
Distribusi Persentase PDRB ADHB (Persen)	55.35	48.89	47.01	47.41	48.73
Laju Pertumbuhan ADHK (Persen)	(2.96)	0.47	0.18	3.95	5.77

Catatan:

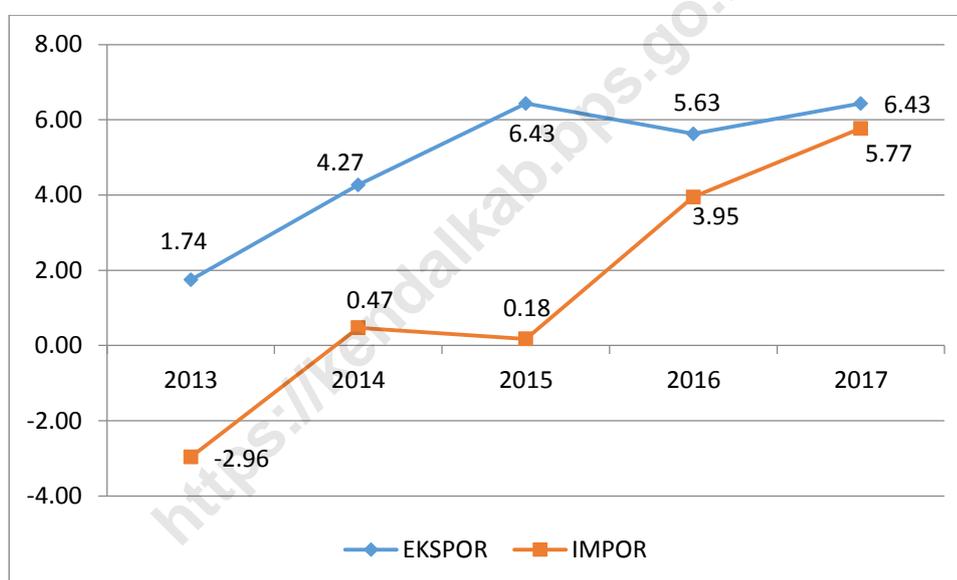
* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

Tabel 15 di atas menunjukkan bahwa nilai impor luar wilayah Kabupaten Kendal atas dasar harga berlaku selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan nilai ini mencapai 17,758 triliun rupiah pada tahun 2017. Dilihat dari sisi harga konstan, pertumbuhan impor Kabupaten Kendal cukup fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 5,77 persen dan terendah pada tahun 2013. Pada tahun ini nilai impor atas dasar harga konstan justru lebih kecil dibanding tahun 2012 dan mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,96 persen. Sebagai gambaran, pada tahun 2014 nilai tukar rupiah terhadap USD melemah, yang berdampak langsung terhadap kenaikan harga barang-barang impor.

Seiring dengan perubahan laju pertumbuhan impor yang fluktuatif setiap tahun, proporsi impor luar wilayah terhadap PDRB juga naik-turun. Pada tahun 2017 peranan impor dari luar wilayah Kendal sebesar 48,73 persen, jauh lebih rendah dibanding kondisi tahun 2013 yang mencapai 55,35 persen. Hal ini menunjukkan ketergantungan ekonomi Kabupaten Kendal terhadap produk-produk impor luar wilayah semakin menurun. Produk impor dari luar wilayah Kendal diantaranya dalam bentuk bahan baku untuk keperluan industri manufaktur, barang modal dan barang-barang konsumsi.

**Grafik 4. Pertumbuhan Ekspor dan Impor Luar Negeri
Tahun 2013-2017**



I. PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi dan kabupaten/kota menjadikan komponen ini (dalam series PDRB tahun dasar 2010) diperlakukan

sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda "**positif**" berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar daripada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya, apabila bertanda "**negatif**" berarti nilai ekspor antar daerah lebih kecil daripada impor antar daerah.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross-hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitungan ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output "bayangan". Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

Dari Tabel 16 berikut dapat dilihat gambaran ekspor dan impor antar daerah, yaitu ekspor Kabupaten Kendal ke kabupaten/kota lain serta impor dari kabupaten/kota lain ke Kabupaten Kendal. Nilai net ekspor atas dasar harga konstan terlihat bahwa nilai ekspor antar daerah selalu lebih besar dibanding nilai impornya, sehingga net ekspor antar daerah selalu positif dari tahun ke tahun. Begitu pula dengan nilai net ekspor atas dasar harga juga menunjukkan hal yang sama. Selama kurun waktu 2013 - 2017 nilai ekspor daerah cenderung lebih besar dari nilai impornya, sehingga net ekspor antar daerah bertanda positif. Net ekspor bertanda negatif hanya terjadi pada tahun 2013 hingga mencapai negatif 422,56 milyar rupiah.

**Tabel 16. Perkembangan Ekspor dan Impor Antar Daerah
Tahun 2013 - 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor dan Impor (ADHB)					
a. Ekspor (Miliar Rp)	13,567.18	14,383.51	15,696.78	17,665.49	19,155.54
b. Impor (Miliar Rp)	13,989.75	13,784.91	14,549.29	16,022.36	17,758.36
Net Ekspor	(422.56)	598.60	1,147.49	1,643.13	1,397.17
Nilai Ekspor dan Impor (ADHK)					
a. Ekspor (Miliar Rp)	12,446.69	12,978.02	13,812.81	14,590.05	15,528.74
b. Impor (Miliar Rp)	11,593.11	11,647.69	11,668.23	12,128.79	12,828.79
Net Ekspor	853.58	1,330.32	2,144.58	2,461.26	2,699.95

Catatan:

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

<https://kendalkab.bps.go.id>

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2013 - 2017



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

A. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

**Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita
Tahun 2013—2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar)					
ADHB	25,274.54	28,194.36	30,951.64	33,795.54	36,441.88
ADHK 2010	22,386.12	23,536.83	24,762.33	26,131.14	27,586.10
PDRB Perkapita(Ribu)					
ADHB	27,271.03	30,166.43	32,847.50	35,586.16	38,078.33
ADHK 2010	24,154.45	25,183.13	26,279.07	27,515.67	28,824.87
Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK 2010	5,30	4,26	4,35	4,71	4,76
Jumlah Penduduk	926,791	934,627	942,283	949,682	957,024
Pertumbuhan Penduduk	0.87	0.85	0.82	0.79	0.77

Catatan:

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan

tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

PDRB perkapita Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 17), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Kendal rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut. Pada tahun 2013 misalnya, PDRB perkapita Kabupaten Kendal adalah sebesar 27,27 juta rupiah. Nilai ini meningkat menjadi 38,08 juta rupiah pada tahun 2017. Dengan demikian, rata-rata penduduk Kabupaten Kendal mampu menghasilkan nilai ekonomi sebesar 38,08 juta rupiah pada tahun 2017.

Sementara itu pertumbuhan per kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 4-6 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 0,8 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan perkapita tersebut tidak saja meningkat secara kuantitas tetapi juga meningkat secara kualitas.

B. PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Kabupaten Kendal (sekitar 60 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Kendal sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Data pada Tabel 18 menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2017, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga berkisar 1,1 kali dari yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Dari tahun ke tahun rasio ini relatif stabil. Meskipun konsumsi rumah tangga meningkat setiap tahun, namun kenaikannya tidak setajam kenaikan ekspor, terutama pada tahun 2015 - 2017. Secara implisit data tersebut menjelaskan, bahwa baik nilai konsumsi akhir rumah tangga maupun ekspor

meningkat dari tahun ke tahun dan peningkatan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga.

Tabel 18. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar)	15,538.15	17,190.08	18,722.68	20,191.14	21,930.16
Total Ekspor (ADHB) (Miliar)	13,567.18	14,383.51	15,696.78	17,665.49	19,155.54
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	1.15	1.20	1.19	1.14	1.14

Catatan:

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

C. PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Kendal digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Rata-rata rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB selama lima tahun terakhir lebih dari 2. Hal ini dapat diartikan bahwa penggunaan produk untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 2 kali dibanding untuk PMTB. Walaupun nilai ini cenderung stabil selama lima tahun terakhir, namun polanya terus menurun hingga pada tahun 2017 mencapai titik terendah, dari 2,26 pada tahun 2013 menjadi 2,13 pada tahun 2017. Apabila ditelusuri lebih jauh, penurunan tersebut lebih disebabkan peningkatan nilai PMTB yang cukup besar di tahun tersebut.

**Tabel 19. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2013—2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar)	15,538.15	17,190.08	18,722.68	20,191.14	21,930.16
Total PMTB (ADHB) (Miliar)	6,864.53	7,751.98	8,606.66	9,402.27	10,305.02
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	2.26	2.22	2.18	2.15	2.13

Catatan:

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

D. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 20. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Tahun 2013—2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar)					
a. Rumah Tangga	15,538.15	17,190.08	18,722.68	20,191.14	21,930.16
b. LNPRT	236.60	276.18	295.23	314.27	342.27
c. Pemerintah	1,434.72	1,584.32	1,796.34	1,899.21	1,987.32
Jumlah	17,209.47	19,050.58	20,814.25	22,404.62	24,259.75
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	25,274.54	28,194.36	30,951.64	33,795.54	36,441.88
Proporsi	0.68	0.68	0.67	0.66	0.67

Catatan:

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

PDRB Kabupaten Kendal Menurut Pengeluaran, 2013-2017

Lebih dari 66 persen produk barang dan jasa yang berada di wilayah domestik Kabupaten Kendal digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Dalam kurun waktu lima tahun proporsi ini relatif stabil, dari 68 persen pada tahun 2013 menjadi 67 persen pada tahun 2017. Sedangkan produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir, yaitu PMTB dan ekspor memiliki peran yang relatif kecil, berkisar 30 persen.

E. PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri (dalam hal ini termasuk ekspor ke kabupaten lain di luar wilayah Kabupaten Kendal). Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 21. Rasio Ekspor terhadap PMTB Tahun 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar)	13,567.18	14,383.51	15,696.78	17,665.49	19,155.54
Total PMTB (ADHB) (Miliar)	6,864.53	7,751.98	8,606.66	9,402.27	10,305.02
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1.98	1.86	1.82	1.88	1.86

Catatan:

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

Total nilai ekspor Kabupaten Kendal lebih besar dibanding nilai PMTB, sehingga rasionya lebih dari 1. Rata-rata rasio ekspor terhadap PMTB selama lima tahun terakhir sebesar 1,88. Nilai rasio ini cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, karena kurang berkembangnya kenaikan ekspor seiring dengan peningkatan PMTB. Rasio terendah justru terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 1,82. Sementara itu rasio terbesar terjadi pada tahun 2013 sebesar 1,98. Penurunan

diantaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan ekspor. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor).

F. PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh luar negeri (termasuk produk dari kabupaten/kota lain). Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan begitu juga sebaliknya.

Tabel 22. Rasio PDRB terhadap Impor Tahun 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar)	25,274.54	28,194.36	30,951.64	33,795.54	36,441.88
Total Impor (ADHB) (Miliar)	13,989.75	13,784.91	14,549.29	16,022.36	17,758.36
Rasio PDRB terhadap Impor	1.81	2.05	2.13	2.11	2.05

Catatan:

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

Rata-rata rasio PDRB terhadap impor tahun 2013 – 2017 sebesar 2,03 dan relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun. Rasio tertinggi tercapai pada tahun 2015 sebesar 2,13 namun terus mengalami penurunan hingga di tahun 2017 menjadi 2,05. Hal ini memperlihatkan ketergantungan PDRB terhadap produk impor cenderung meningkat pada tiga tahun terakhir.

G. NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep,

selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Tabel 23. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Tahun 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar)	13,567.18	14,383.51	15,696.78	17,665.49	19,155.54
Nilai Impor (ADHB)(Miliar)	13,989.75	13,784.91	14,549.29	16,022.36	17,758.36
Net ekspor (X - M) (Miliar)	(422.56)	598.60	1,147.49	1,643.13	1,397.17
Rasio ekspor thdp Impor	0.97	1.04	1.08	1.10	1.08

Catatan:

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

Selama periode 2013 - 2017, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Kendal dengan luar provinsi dan antar kabupaten/kota, mulai menunjukkan nilai positif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Kendal mulai berada dalam posisi surplus. Nilai ekspor yang lebih kecil dari impor hanya terjadi pada tahun 2013 saja. Hal ini menyebabkan adanya aliran devisa keluar, yang dalam konteks lain disebut sebagai “hutang luar negeri”. Sedangkan pada tahun 2014 – 2017, nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, sehingga terjadi aliran devisa masuk.

Surplus perdagangan Kabupaten Kendal yang terjadi antara tahun 2014 sampai dengan 2017 tercatat masing-masing sebesar 599 milyar rupiah (2014), 1,147 trilyun rupiah (2015), 1,643 trilyun rupiah (2016) dan 1,397 trilyun rupiah (2017).

Sementara itu rasio ekspor terhadap impor cenderung memperlihatkan kenaikan hanya saja sedikit menurun di tahun 2017. Selama lima tahun terakhir rata-rata rasio sebesar 1,05 dengan rasio terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 0,97, dimana pada tahun ini terjadi defisit perdagangan sebesar 423 milyar rupiah.

I. INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana:

I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.

**Tabel 24. Incremental Capital Output Ratio
Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar)	22,386.12	23,536.83	24,762.33	26,131.14	27,586.10
Perubahan (Miliar)	1,310.41	1,150.71	1,225.49	1,368.81	1,454.96
PMTB (ADHK 2010) (Miliar)	6,096.41	6,249.63	6,539.81	6,915.76	7,386.03
ICOR	4.65	5.43	5.34	5.05	5.08

Catatan:

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

Data di atas menunjukkan besaran ICOR mengalami kenaikan pada tahun 2014 dari sebesar 4,65 pada tahun 2013 menjadi 5,43 pada tahun 2014. Namun demikian, nilai ICOR kembali menurun pada kurun waktu 2015-2016 dan kembali naik pada tahun 2017. Pada tahun 2017, nilai ICOR mencapai 5,08 setelah sebelumnya sebesar 5,05. Semakin tinggi nilai ICOR menunjukkan semakin besar kapital yang digunakan untuk dapat meningkatkan 1 unit nilai output.

BAB V

PENUTUP



1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2013 - 2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Kendal pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Nominal PDRB Kabupaten Kendal tahun 2017 atas dasar harga berlaku mencapai 36,44 triliun rupiah. Dari nilai sebesar itu sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir, yaitu konsumsi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah yang mencapai 67 persen dimana 60 persennya adalah konsumsi rumah tangga. Dengan peranan konsumsi rumah tangga yang sangat dominan, tidak dapat dipungkiri bahwa komponen ini adalah penopang dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal. Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal mencapai 5,57 persen, sedangkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 4,56 persen.
3. Peranan investasi dalam perekonomian selalu merupakan *issue* yang menarik untuk diulas, karena investasi dalam bentuk modal/fisik akan digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi yang keluarannya adalah output. Peranan investasi dalam PDRB Pengeluaran Kabupaten Kendal dapat didekati dari proporsi PMTB dalam PDRB. Proporsi PMTB ini berada pada kisaran 27-28 persen, atau dapat dikatakan peranan investasi dalam perekonomian Kabupaten Kendal hanya sekitar 28 persen saja. Dari nilai ICOR Kabupaten Kendal yang kembali meningkat dapat disimpulkan bahwa untuk menambah 1 unit output setiap tahun, investasi yang ditanamkan semakin besar.
4. PDRB Kabupaten Kendal 2017 baru sanggup memenuhi 77 persen dari total permintaan akhir, sehingga kekurangan *supply* diperoleh dari impor. Impor yang

dimaksud disini adalah impor dari luar negeri, provinsi, maupun dari kabupaten/kota lain. Peranan impor dalam perekonomian Kabupaten Kendal cukup besar dan nilainya meningkat dari tahun ke tahun.

5. Selama periode 2013 – 2017, nilai impor Kabupaten Kendal lebih kecil dari nilai eksportnya, sehingga setiap tahun terjadi surplus neraca perdagangan. Nilai ekspor yang lebih kecil dari impor hanya terjadi pada tahun 2013 saja. Surplus perdagangan Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun sedikit menurun pada tahun 2017, namun rasio nilai ekspor terhadap impor masih berada di angka 1,08 kali.
6. Dari seluruh data, indikator dan ulasan yang ditampilkan dalam publikasi ini dapat dimanfaatkan oleh para pengguna data untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan, evaluasi dan berbagai analisis ekonomi lainnya. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, juga dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Sistem Neraca Nasional 2008*, Jakarta, 2013.
2. _____, *Pedoman Penyusunan PDRB Kabupaten/Kota Tahun Dasar 2010 Menurut Pengeluaran*, Jakarta, 2014.
3. _____, *Booklet Perubahan Tahun Dasar PDB Berbasis SNA 2008*, Jakarta, 2014.
4. _____, *Produk Domestik Bruto menurut Penggunaan 2008-2013*, Jakarta, 2014
5. BPS Provinsi Jawa Tengah , *Tabel Input Output Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
6. _____, *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
7. _____, *Beberapa Indikator Makro Sosial Ekonomi Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
8. _____, *Kabupaten Kendal dalam Angka*, berbagai seri, Kendal.
9. _____, *Statistik Air Bersih Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
10. _____, *Statistik Impor Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
11. _____, *Statistik Industri Manufaktur Besar Sedang Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
12. _____, *Statistik Ekspor Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (*Juta Rupiah*)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	15,538,150.97	17,190,084.51	18,722,675.14	20,191,139.76	21,930,155.11
1.a. Makanan dan Minuman	6,078,173.16	6,598,925.65	7,101,765.92	7,735,781.58	8,202,872.62
1.b. Pakaian	726,800.54	786,081.56	847,927.43	910,523.35	979,761.55
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	2,092,531.85	2,363,818.13	2,608,496.04	2,836,947.77	3,138,081.03
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	978,303.91	1,094,185.32	1,179,753.66	1,274,835.11	1,389,169.39
1.e. Transportasi dan Komunikasi	4,165,482.34	4,655,909.50	5,102,495.46	5,349,760.35	5,913,011.71
1.f. Restoran dan Hotel	1,206,559.74	1,371,283.14	1,519,907.03	1,680,604.51	1,862,786.62
1.g. lainnya	290,299.43	319,881.22	362,329.61	402,687.08	444,472.20
2. Konsumsi LNPRT	236,596.36	276,181.76	295,233.02	314,268.01	342,268.01
3. Konsumsi Pemerintah	1,434,721.80	1,584,324.28	1,796,339.23	1,899,212.46	1,987,316.87
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,864,527.94	7,751,976.49	8,606,659.88	9,402,271.57	10,305,023.46
4.a. Bangunan	4,844,372.92	5,522,285.83	6,307,295.84	6,972,015.12	7,739,767.01
4.b. Non-Bangunan	2,020,155.02	2,229,690.66	2,309,364.04	2,430,256.45	2,565,256.45
5. Perubahan Inventori	1,623,110.61	793,187.82	383,245.68	345,518.85	479,941.55
6. Ekspor	13,567,180.76	14,383,509.28	15,696,783.08	17,665,492.27	19,155,536.58
7. Impor	13,989,745.02	13,784,905.64	14,549,291.87	16,022,362.67	17,758,362.67
PDRB PENGELUARAN	25,274,543.43	28,194,358.49	30,951,644.16	33,795,540.25	36,441,878.91

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran (*Juta Rupiah*)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	13,296,708.17	13,914,924.61	14,480,652.62	15,115,434.63	15,805,199.29
1.a. Makanan dan Minuman	4,928,425.38	5,005,004.57	5,158,357.47	5,334,358.51	5,494,841.71
1.b. Pakaian	674,513.53	713,334.08	747,831.51	782,449.49	820,487.16
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1,865,433.46	1,983,235.68	2,085,838.27	2,192,091.37	2,309,296.92
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	894,446.73	953,935.28	988,047.55	1,028,518.53	1,078,349.83
1.e. Transportasi dan Komunikasi	3,618,602.60	3,856,104.06	4,021,681.98	4,216,854.13	4,439,047.19
1.f. Restoran dan Hotel	1,058,465.32	1,123,778.61	1,183,849.47	1,250,848.78	1,334,974.67
1.g. lainnya	256,821.14	279,532.32	295,046.36	310,313.81	328,201.81
2. Konsumsi LNPRT	195,224.36	212,765.10	212,571.81	219,817.90	230,787.21
3. Konsumsi Pemerintah	1,150,058.82	1,178,812.34	1,217,523.48	1,228,472.59	1,252,472.59
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,096,406.77	6,249,634.03	6,539,807.89	6,915,759.26	7,386,030.03
4.a. Bangunan	4,349,963.61	4,501,007.21	4,802,405.86	5,166,921.15	5,596,921.15
4.b. Non-Bangunan	1,746,443.16	1,748,626.82	1,737,402.03	1,748,838.11	1,789,108.88
5. Perubahan Inventori	794,149.45	650,373.96	167,193.92	190,394.14	211,654.71
6. Ekspor	12,446,688.39	12,978,016.22	13,812,807.19	14,590,047.50	15,528,742.23
7. Impor	11,593,112.45	11,647,691.87	11,668,231.55	12,128,788.95	12,828,788.95
PDRB PENGELUARAN	22,386,123.50	23,536,834.39	24,762,325.36	26,131,137.07	27,586,097.11

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	61.48	60.97	60.49	59.74	60.18
1.a. Makanan dan Minuman	24.05	23.41	22.94	22.89	22.51
1.b. Pakaian	2.88	2.79	2.74	2.69	2.69
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	8.28	8.38	8.43	8.39	8.61
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3.87	3.88	3.81	3.77	3.81
1.e. Transportasi dan Komunikasi	16.48	16.51	16.49	15.83	16.23
1.f. Restoran dan Hotel	4.77	4.86	4.91	4.97	5.11
1.g. lainnya	1.15	1.13	1.17	1.19	1.22
2. Konsumsi LNPRT	0.94	0.98	0.95	0.93	0.94
3. Konsumsi Pemerintah	5.68	5.62	5.80	5.62	5.45
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	27.16	27.49	27.81	27.82	28.28
4.a. Bangunan	19.17	19.59	20.38	20.63	21.24
4.b. Non-Bangunan	7.99	7.91	7.46	7.19	7.04
5. Perubahan Inventori	6.42	2.81	1.24	1.02	1.32
6. Ekspor	53.68	51.02	50.71	52.27	52.56
7. Impor	55.35	48.89	47.01	47.41	48.73
PDRB PENGELUARAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (*Persen*)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	59.40	59.12	58.48	57.84	57.29
1.a. Makanan dan Minuman	22.02	21.26	20.83	20.41	19.92
1.b. Pakaian	3.01	3.03	3.02	2.99	2.97
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	8.33	8.43	8.42	8.39	8.37
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4.00	4.05	3.99	3.94	3.91
1.e. Transportasi dan Komunikasi	16.16	16.38	16.24	16.14	16.09
1.f. Restoran dan Hotel	4.73	4.77	4.78	4.79	4.84
1.g. lainnya	1.15	1.19	1.19	1.19	1.19
2. Konsumsi LNPRT	0.87	0.90	0.86	0.84	0.84
3. Konsumsi Pemerintah	5.14	5.01	4.92	4.70	4.54
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	27.23	26.55	26.41	26.47	26.77
4.a. Bangunan	19.43	19.12	19.39	19.77	20.29
4.b. Non-Bangunan	7.80	7.43	7.02	6.69	6.49
5. Perubahan Inventori	3.55	2.76	0.68	0.73	0.77
6. Ekspor	55.60	55.14	55.78	55.83	56.29
7. Impor	51.79	49.49	47.12	46.42	46.50
PDRB PENGELUARAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (*Persen*)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	10.76	10.63	8.92	7.84	8.61
1.a. Makanan dan Minuman	8.36	8.57	7.62	8.93	6.04
1.b. Pakaian	6.51	8.16	7.87	7.38	7.60
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	12.13	12.96	10.35	8.76	10.61
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	8.59	11.85	7.82	8.06	8.97
1.e. Transportasi dan Komunikasi	14.30	11.77	9.59	4.85	10.53
1.f. Restoran dan Hotel	13.22	13.65	10.84	10.57	10.84
1.g. lainnya	11.37	10.19	13.27	11.14	10.38
2. Konsumsi LNPRT	18.32	16.73	6.90	6.45	8.91
3. Konsumsi Pemerintah	12.33	10.43	13.38	5.73	4.64
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	12.83	12.93	11.03	9.24	9.60
4.a. Bangunan	11.25	13.99	14.22	10.54	11.01
4.b. Non-Bangunan	16.80	10.37	3.57	5.23	5.55
5. Perubahan Inventori	-7.17	-51.13	-51.68	-9.84	38.90
6. Ekspor	0.81	6.02	9.13	12.54	8.43
7. Impor	2.23	-1.46	5.55	10.12	10.83
PDRB PENGELUARAN	9.36	11.55	9.78	9.19	7.83

Catatan:

* *Angka Sementara*

** *Angka Sangat Sementara*

Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (*Persen*)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.63	4.65	4.07	4.38	4.56
1.a. Makanan dan Minuman	1.23	1.55	3.06	3.41	3.01
1.b. Pakaian	5.50	5.76	4.84	4.63	4.86
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	6.86	6.32	5.17	5.09	5.35
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6.51	6.65	3.58	4.10	4.84
1.e. Transportasi dan Komunikasi	6.77	6.56	4.29	4.85	5.27
1.f. Restoran dan Hotel	6.99	6.17	5.35	5.66	6.73
1.g. lainnya	8.56	8.84	5.55	5.17	5.76
2. Konsumsi LNPRT	8.72	8.98	(0.09)	3.41	4.99
3. Konsumsi Pemerintah	5.87	2.50	3.28	0.90	1.95
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.32	2.51	4.64	5.75	6.80
4.a. Bangunan	8.52	3.47	6.70	7.59	8.32
4.b. Non-Bangunan	7.82	0.13	(0.64)	0.66	2.30
5. Perubahan Inventori	(33.08)	(18.10)	(74.29)	13.88	11.17
6. Ekspor	1.74	4.27	6.43	5.63	6.43
7. Impor	(2.96)	0.47	0.18	3.95	5.77
PDRB PENGELUARAN	6.22	5.14	5.21	5.53	5.57

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 7. Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto menurut Pengeluaran (*Persen*)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	104.82	109.70	114.78	120.11	125.00
1.a. Makanan dan Minuman	100.73	101.99	103.24	104.85	108.06
1.b. Pakaian	107.35	111.11	117.22	123.96	129.96
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	104.17	109.98	117.53	124.95	131.41
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	106.69	114.88	122.36	130.49	135.16
1.e. Transportasi dan Komunikasi	110.45	119.16	127.23	135.58	141.40
1.f. Restoran dan Hotel	103.63	110.87	118.61	125.93	132.66
1.g. lainnya	120.21	130.77	141.97	154.53	163.10
2. Konsumsi LNPRT	100.69	104.99	114.14	124.39	124.28
3. Konsumsi Pemerintah	105.38	106.74	113.01	115.83	119.64
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	108.70	124.45	134.80	138.19	144.61
4.a. Bangunan	105.62	114.20	123.93	128.23	136.82
4.b. Non-Bangunan	119.37	159.98	172.50	172.71	171.60
5. Perubahan Inventori	782.93	771.26	516.10	422.67	108.66
6. Ekspor	102.01	100.29	102.04	106.39	113.24
7. Impor	109.86	110.11	106.85	107.35	107.54
PDRB PENGELUARAN	106.57	112.12	119.09	125.21	131.73

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 8. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (Tahun 2010=100) menurut Pengeluaran
(Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	100,00	116.86	123.54	129.29	133.58	138.75
1.a. Makanan dan Minuman	100,00	123.33	131.85	137.67	145.02	149.28
1.b. Pakaian	100,00	107.75	110.20	113.38	116.37	119.41
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	100,00	112.17	119.19	125.06	129.42	135.89
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	109.38	114.70	119.40	123.95	128.82
1.e. Transportasi dan Komunikasi	100,00	115.11	120.74	126.87	126.87	133.20
1.f. Restoran dan Hotel	100,00	113.99	122.02	128.39	134.36	139.54
1.g. lainnya	100,00	113.04	114.43	122.80	129.77	135.43
2. Konsumsi LNPRT	100,00	121.19	129.81	138.89	142.97	148.30
3. Konsumsi Pemerintah	100,00	124.75	134.40	147.54	154.60	158.67
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	100,00	112.60	124.04	131.60	135.95	139.52
4.a. Bangunan	100,00	111.37	122.69	131.34	134.94	138.29
4.b. Non-Bangunan	100,00	115.67	127.51	132.92	138.96	143.38
5. Perubahan Inventori	100,00	204.38	121.96	229.22	181.48	226.76
6. Ekspor	100,00	109.00	110.83	113.64	121.08	123.36
7. Impor	100,00	120.67	118.35	124.69	132.10	138.43
PDRB PENGELUARAN	100,00	112.90	119.79	124.99	129.33	132.10

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 9. Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto (Tahun 2010=100) menurut Pengeluaran
(Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5.86	5.72	4.66	3.31	3.87
1.a. Makanan dan Minuman	7.05	6.91	4.42	5.33	2.94
1.b. Pakaian	0.96	2.27	2.89	2.63	2.62
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	4.94	6.25	4.92	3.49	5.00
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1.96	4.87	4.10	3.81	3.93
1.e. Transportasi dan Komunikasi	7.05	4.89	5.08	(0.01)	5.00
1.f. Restoran dan Hotel	5.83	7.05	5.21	4.65	3.86
1.g. lainnya	2.58	1.24	7.31	5.67	4.36
2. Konsumsi LNPRT	8.83	7.11	7.00	2.94	3.73
3. Konsumsi Pemerintah	6.10	7.73	9.78	4.78	2.63
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.16	10.16	6.10	3.31	2.62
4.a. Bangunan	2.52	10.17	7.05	2.74	2.48
4.b. Non-Bangunan	8.33	10.23	4.24	4.55	3.18
5. Perubahan Inventori	38.72	(40.33)	87.95	(20.83)	24.95
6. Ekspor	(0.92)	1.68	2.54	6.55	1.88
7. Impor	5.35	(1.93)	5.36	5.94	4.79
PDRB PENGELUARAN	2.96	6.10	4.35	3.47	2.14

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 10. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (Tahun 2010=100) (Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	110.76	110.63	108.92	107.84	108.61
1.a. Makanan dan Minuman	108.36	108.57	107.62	108.93	106.04
1.b. Pakaian	106.51	108.16	107.87	107.38	107.60
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	112.13	112.96	110.35	108.76	110.61
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	108.59	111.85	107.82	108.06	108.97
1.e. Transportasi dan Komunikasi	114.30	111.77	109.59	104.85	110.53
1.f. Restoran dan Hotel	113.22	113.65	110.84	110.57	110.84
1.g. lainnya	111.37	110.19	113.27	111.14	110.38
2. Konsumsi LNPRT	118.32	116.73	106.90	106.45	108.91
3. Konsumsi Pemerintah	112.33	110.43	113.38	105.73	104.64
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	112.83	112.93	111.03	109.24	109.60
4.a. Bangunan	111.25	113.99	114.22	110.54	111.01
4.b. Non-Bangunan	116.80	110.37	103.57	105.23	105.55
5. Perubahan Inventori	92.83	48.87	48.32	90.16	138.90
6. Ekspor	100.81	106.02	109.13	112.54	108.43
7. Impor	102.23	98.54	105.55	110.12	110.83
PDRB PENGELUARAN	109.36	111.55	109.78	109.19	107.83

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 11. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (Tahun 2010=100) (Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	104.63	104.65	104.07	104.38	104.56
1.a. Makanan dan Minuman	101.23	101.55	103.06	103.41	103.01
1.b. Pakaian	105.50	105.76	104.84	104.63	104.86
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	106.86	106.32	105.17	105.09	105.35
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	106.51	106.65	103.58	104.10	104.84
1.e. Transportasi dan Komunikasi	106.77	106.56	104.29	104.85	105.27
1.f. Restoran dan Hotel	106.99	106.17	105.35	105.66	106.73
1.g. lainnya	108.56	108.84	105.55	105.17	105.76
2. Konsumsi LNPRT	108.72	108.98	99.91	103.41	104.99
3. Konsumsi Pemerintah	105.87	102.50	103.28	100.90	101.95
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	108.32	102.51	104.64	105.75	106.80
4.a. Bangunan	108.52	103.47	106.70	107.59	108.32
4.b. Non-Bangunan	107.82	100.13	99.36	100.66	102.30
5. Perubahan Inventori	66.92	81.90	25.71	113.88	111.17
6. Ekspor	101.74	104.27	106.43	105.63	106.43
7. Impor	97.04	100.47	100.18	103.95	105.77
PDRB PENGELUARAN	106.22	105.14	105.21	105.53	105.57

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KENDAL**

Jl Pramuka (Komplek Perkantoran) Kendal 51351; Telp. (0294) 381461-383461;
Fax. (0294) 383461; E-mail: bps3324@bps.go.id Homepage: <http://kendalkab.bps.go.id>

ISBN 978-602-71234-4-1



9 786027 123441